

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dengan adanya RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari Walikota Padang RPJMD diharapkan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih berkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya RKPD ini dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Pentapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya yang baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah manapun yang berupa sumbu untuk mendorong partisipasi masyarakat serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.
2. Dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat melibatkan segala unsur didalamnya dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencana, pelaksana dan pengawasan sehingga apa yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah seperti yang diharapkan dan bisa memenuhi kebutuhan Provinsi Sumatera Barat.



3. RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
4. Untuk pelaksanaannya sendiri pada tahun 2024 sedang dilaksanakan. Apabila ada kendala atau rencana yang telah direncanakan tidak terlaksanakan, akan dilaksanakan kembali pada RKPD perubahan.
5. Tidak terlaksanakan rencana tersebut di sebabkan dari segi target dan beberapa faktor.

5.2 Saran

1. Belum optimalnya pelayanan public dan tata pemerintahan yang baik, transparan, bersih dan bertanggungjawab.
2. Belum optimalnya pembangunan SDM
3. Belum efektifnya program penanggulannya kemiskinan.
4. Kurangnya ketaatan terhadap tata ruang, perhatian lingkungan hidup dan antisipasi penanggulan bencana.
5. Kurangnya sarana dan prasarana perkotaan, pemukiman, dan transportasi.
6. Rendahnya ketertiban masyarakat.
7. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dari prioritas masalah.



8. Kepala Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
9. Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas perlu dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal.
10. Dalam perumusan kegiatan-kegiatan proses penyusunan RKPD Pemerintah haruslah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, pertimbangan dan pengkajian yang mendalam perlu dilakukan terhadap semua kegiatan yang direncanakan untuk tercapainya hasil yang lebih baik dan tahan lama.

